

# **POLITIK KEBIJAKAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI TANJUNG LAPIN DI KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023**

**Oleh : Nurvitasari**

**Email : [nurvitasari3947@student.unri.ac.id](mailto:nurvitasari3947@student.unri.ac.id)**

**Dosen Pembimbing : Agus Susanto,S.I.P.,M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

## **ABSTRAK**

Politik pariwisata merupakan wujud integrasi antara kebijakan publik dan strategi pembangunan sektor pariwisata yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Bengkalis, sektor pariwisata menjadi salah satu urusan pemerintahan pilihan yang memiliki potensi strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat citra daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik kebijakan pariwisata diterapkan dalam pengembangan Pantai Lapin serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pariwisata sebagai sektor strategis membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik destinasi wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, DPRD, LSM, hingga masyarakat lokal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk menggambarkan realitas politik kebijakan pariwisata yang berlangsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan Pantai Lapin masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya promosi, dan belum optimalnya infrastruktur pendukung wisata. Meskipun pemerintah berperan sebagai fasilitator, dominasi elite lokal dan minimnya keterlibatan masyarakat menimbulkan ketimpangan manfaat. Oleh karena itu, transparansi kebijakan, peningkatan peran masyarakat, dan perlindungan aspek sosial-ekologis sangat diperlukan guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Rupat Utara kabupaten Bengkalis.

**Kata Kunci :Politik Kebijakan, Pariwisata, Pengembangan Objek Wisata, Pantai Lapin**

**TOURISM POLICY IN THE DEVELOPMENT OF TANJUNG LAPIN BEACH  
TOURISM IN RUPAT UTARA DISTRICT, BENGKALIS  
REGENCY IN 2023**

**By : Nurvitasari**

**Email : [nurvitasari3947@student.unri.ac.id](mailto:nurvitasari3947@student.unri.ac.id)**

**Supervisor : Agus Susanto,S.I.P.,M.Si.**

*Department of Government Science*

*Faculty of Social and Political Science, Riau University*

*Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293*

**ABSTRACT**

*Tourism policy is a manifestation of the integration of public policy and tourism sector development strategies oriented towards community welfare and environmental sustainability. In the context of Bengkalis Regency, the tourism sector is a selected government affair with strategic potential to increase Regional Original Income (PAD) and strengthen the region's image. The purpose of this study is to examine the tourism policy applied to the development of Lapin Beach and the factors influencing it. Tourism, as a strategic sector, requires appropriate government policies to improve community welfare while strengthening the attractiveness of tourist destinations. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants came from the Bengkalis Regency Tourism Office, the Regional People's Representative Council (DPRD), NGOs, and local communities. The collected data was then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to illustrate the political realities of tourism policy in the field. The research results show that Lapin Beach development policies still face several obstacles, including budget constraints, lack of community participation, weak promotion, and suboptimal tourism infrastructure. Although the government acts as a facilitator, the dominance of local elites and minimal community involvement have led to unequal benefits. Therefore, policy transparency, increased community participation, and protection of socio-ecological aspects are essential to realizing inclusive and sustainable tourism development in North Rupat District, Bengkalis Regency.*

**Keywords : Policy Politics, Tourism, Tourism Object Development, Lapin Beach**

## PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan dalam sebuah sistem negara yang berkaitan dengan proses penentuan serta pelaksanaan tujuan-tujuan kolektif. Dalam konteks pembangunan, pengambilan keputusan mengenai tujuan sistem politik melibatkan seleksi di antara berbagai alternatif serta penetapan skala prioritas yang bertujuan untuk mencapai tatanan sosial yang adil dan sejahtera. Salah satu sektor yang kini menjadi prioritas strategis dalam dinamika politik pembangunan adalah pariwisata. Sebagai sektor yang memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, perkembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari peran "politik pariwisata". Hal ini mencakup integrasi antara kebijakan publik, regulasi, dan strategi pemerintah dalam mengelola serta mempromosikan destinasi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan citra positif suatu wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pariwisata dikategorikan sebagai urusan pemerintahan pilihan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi unggulannya secara mandiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kabupaten Bengkalis merespons kewenangan ini dengan menetapkan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Fokus pengembangan diarahkan ke Kecamatan Rupert Utara

yang memiliki potensi wisata bahari bernilai tinggi, dengan Pantai Tanjung Lapin sebagai ikon utamanya. Pantai ini memiliki karakteristik yang sangat eksotis dengan hamparan pasir putih sepanjang  $\pm 17$  Km yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, menjadikannya salah satu aset strategis yang diakui secara nasional.

Legitimasi pengembangan Pantai Tanjung Lapin diperkuat oleh status Pulau Rupert sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Di tingkat daerah, komitmen ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPPDA) Kabupaten Bengkalis. Pemerintah daerah telah berupaya mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pembangunan sarana prasarana, penguatan kelembagaan melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), hingga penyelenggaraan berbagai *event* tahunan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang pada tahun 2023 mencapai 19.764 orang di Pantai Tanjung Lapin. Namun demikian, meskipun didukung oleh regulasi yang kuat dan potensi alam yang besar, implementasi kebijakan pariwisata di Pantai Tanjung Lapin masih menghadapi tantangan krusial. Masalah aksesibilitas menjadi kendala utama di mana infrastruktur jalan darat menuju Rupert Utara masih belum memadai, sering kali masih berupa jalan berbatu yang menyulitkan wisatawan. Selain itu, realitas di lapangan menunjukkan adanya

keterbatasan anggaran, minimnya keterlibatan investor swasta, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal yang merasa manfaat ekonomi belum terdistribusi secara merata. Kebijakan yang bersifat top-down (dari atas ke bawah) sering kali belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dan keinginan warga setempat, yang mengakibatkan belum optimalnya pencapaian tujuan pembangunan pariwisata yang inklusif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik kebijakan pariwisata diterapkan dalam pengembangan Pantai Tanjung Lapin serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai dinamika hubungan antar aktor dan implementasi kebijakan, diharapkan dapat ditemukan strategi pengembangan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Kecamatan Rupert Utara

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Politik Kebijakan Pariwisata Bagaimana Politik kebijakan Pariwisata dalam Pengembangan objek Wisata Pantai Lapin di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tahun 2023?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Politik kebijakan Pariwisata dalam Pengembangan objek Wisata Pantai Lapin di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tahun 2023?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Politik kebijakan Pariwisata dalam Pengembangan objek Wisata Pantai Lapin di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tahun 2023
2. Bagaimana Politik Kebijakan Pariwisata Bagaimana Politik kebijakan Pariwisata dalam Pengembangan objek Wisata Pantai Lapin di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis tahun 2023?

## **TINJAUAN TEORI**

### **Konsep Politik dan Kebijakan Pariwisata**

Konsep Politik Kebijakan Pariwisata Politik pariwisata merupakan hasil integrasi antara kebijakan publik dan strategi pembangunan sektor pariwisata yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Secara terminologi, politik pariwisata adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan dalam mengatur, mengembangkan, dan mengawasi sektor pariwisata. Miriam Budiardjo menekankan bahwa politik dalam sebuah negara berkaitan erat dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta alokasi atau distribusi sumber daya. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah sangat krusial karena menentukan daya tarik suatu daerah melalui regulasi, pembangunan

infrastruktur, hingga langkah-langkah keamanan.

### **Kebijakan Publik dan Implementasi**

Kebijakan pariwisata didefinisikan sebagai kerangka regulasi, pedoman, dan strategi yang memberikan arah bagi pengambilan keputusan kolektif dalam pengembangan destinasi jangka panjang. Keberhasilan pengembangan pariwisata sangat bergantung pada efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Menurut teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn terdapat beberapa variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan kebijakan, antara lain Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Standar dan sasaran kebijakan harus jelas agar para pelaksana memahami arah dan maksud umum dari kebijakan tersebut

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Standar dan sasaran kebijakan harus jelas agar para pelaksana memahami arah dan maksud umum dari kebijakan tersebut.
2. Sumber Daya: Keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya organisasi, yang mencakup kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan anggaran (finansial), serta fasilitas material atau sarana prasarana.
3. Karakteristik Agen Pelaksana: Fokus pada organisasi formal dan informal yang terlibat, di mana kinerja dipengaruhi oleh kecocokan ciri agen (seperti tingkat kedisiplinan atau

keterbukaan) dengan konteks kebijakan yang dijalankan

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Implementasi: Koordinasi dan penyampaian informasi yang konsisten antar instansi pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keseragaman langkah.
5. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana (Dispositions): Variabel ini mencakup dukungan atau penolakan para pelaksana terhadap kebijakan. Implementasi dapat gagal jika pelaksana tidak setuju atau tidak memahami tujuan kebijakan karena merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik: Kondisi eksternal seperti dukungan masyarakat, stabilitas politik, dan situasi ekonomi daerah yang memengaruhi sejauh mana kebijakan dapat diterima dan dijalankan

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam, sistematis, dan faktual mengenai dinamika politik kebijakan pariwisata dalam pengembangan Pantai Tanjung Lapin di Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis. Penentuan lokasi penelitian dilakukan

secara sengaja mengingat Pantai Tanjung Lapin merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang memiliki urgensi politik dan ekonomi tinggi bagi daerah. Untuk mendapatkan data yang akurat, pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan aktor-aktor kunci dari unsur birokrasi seperti Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, unsur legislatif (DPRD), hingga aktor akar rumput seperti pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku UMKM, dan masyarakat setempat.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama untuk mencapai triangulasi data yang valid. Pertama, observasi langsung dilakukan di lapangan untuk mengamati kondisi infrastruktur dan sarana prasarana wisata secara riil. Kedua, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhi proses politik dalam pengembangan wisata tersebut. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengkaji regulasi seperti RPJMD, RIPPDA, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan lokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data untuk menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan objek wisata Pantai Tanjung Lapin di Kecamatan Rupat Utara merupakan manifestasi nyata dari politik kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menempatkan pariwisata sebagai sektor strategis. Berdasarkan analisis model Van Meter dan Van Horn, kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan menjadi fondasi utama. Pemerintah telah menetapkan target ambisius dengan menjadikan Pulau Rupat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Secara politis, kebijakan ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian ekonomi, yang dibuktikan dengan capaian retribusi sebesar Rp 54.721.344 dari puluhan ribu kunjungan wisatawan sepanjang tahun 2023.

Namun, ketersediaan sumber daya masih menjadi ganjalan serius dalam implementasi kebijakan tersebut. Meskipun sarana fisik seperti gazebo, toilet, dan kios pedagang telah dibangun, dukungan finansial menunjukkan kerentanan karena sangat bergantung pada APBD Kabupaten Bengkalis. Ketiadaan dana sharing dari Pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran tertentu mengakibatkan beberapa program pemeliharaan sarana prasarana menjadi terhambat. Hal ini mencerminkan bahwa komitmen politik di tingkat lokal belum sepenuhnya tersinkronisasi dengan dukungan anggaran di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Dari sisi agen pelaksana, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan,



dan Olahraga Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan kinerja yang cukup proaktif dalam mengawal kebijakan. Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kolaborasi dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), berbagai kegiatan pembinaan telah dijalankan. Meski demikian, karakteristik birokrasi yang masih formalistik terkadang menghambat fleksibilitas di lapangan, terutama saat menghadapi dinamika sosial masyarakat yang membutuhkan pendekatan lebih persuasif dan berkelanjutan.

Komunikasi antar organisasi juga memegang peranan vital namun masih menyimpan kelemahan pada aspek edukasi publik. Koordinasi antar instansi memang berjalan, tetapi penyampaian informasi mengenai standar Sapta Pesona kepada pengunjung dan masyarakat sekitar masih sangat minim. Hal ini diperburuk dengan kondisi fasilitas informasi di lokasi wisata, seperti papan pengumuman yang sudah pudar dan tidak layak baca. Lemahnya komunikasi ini berdampak pada rendahnya kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di kawasan pantai.

Variabel sikap atau kecenderungan para pelaksana (dispositions) menunjukkan adanya dualisme. Di satu sisi, terdapat semangat inovasi seperti rencana pengembangan konsep wisata halal dan perluasan area parkir untuk mengatasi kemacetan. Namun di sisi lain, masih ditemukan sikap individualistik di antara pengelola yang menghambat terciptanya kerja tim yang solid. Kurangnya rasa saling percaya antar

individu dalam kelompok kerja mengakibatkan pengambilan keputusan sering kali berjalan lamban dan kurang transparan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pelayanan kepada wisatawan.

Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi juga memberikan tantangan tersendiri bagi politik kebijakan ini. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Pantai Tanjung Lapin masih cenderung pasif dan sering kali didominasi oleh elite lokal tertentu. Hal ini menciptakan persepsi bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata belum terdistribusi secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, rendahnya tingkat kepatuhan wisatawan dalam membayar retribusi menunjukkan bahwa penegakan aturan di lapangan masih lemah dan memerlukan pengawasan politik yang lebih ketat.

Faktor penghambat yang paling krusial adalah masalah aksesibilitas dan infrastruktur pendukung yang tidak memadai. Jalan darat dari pelabuhan Tanjung Kapal menuju Rupert Utara masih didominasi oleh perkerasan batu yang rusak, yang menjadi beban bagi wisatawan yang berkunjung. Secara politis, lambatanya perbaikan infrastruktur ini menunjukkan adanya hambatan dalam skala prioritas pembangunan lintas sektor. Jika masalah akses ini tidak segera diatasi, potensi besar Pantai Tanjung Lapin sebagai ikon wisata nasional sulit untuk dioptimalkan.

Terakhir, ancaman lingkungan berupa abrasi pantai menjadi isu mendesak yang belum tertangani secara

strategis. Meskipun pihak pengelola telah melaporkan kerusakan infrastruktur akibat pengikisan air laut, respons kebijakan dari otoritas terkait cenderung lamban karena prosedur birokrasi yang panjang. Sinergitas antara pemerintah, sektor swasta dalam hal investasi, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan agar politik kebijakan pariwisata di Kabupaten Bengkalis dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap politik kebijakan pariwisata dalam pengembangan Pantai Tanjung Lapin tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut merupakan instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalisasi potensi daerah sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Secara politis, kebijakan ini telah berhasil memberikan kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah, yang tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan capaian retribusi yang signifikan. Implementasi kebijakan yang ditinjau melalui model Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa agen pelaksana telah memiliki keselarasan tujuan dan sikap yang proaktif dalam menyediakan fasilitas dasar wisata. Namun, efektivitas pencapaian tujuan kebijakan tersebut masih sangat rentan karena ketergantungan yang tinggi pada anggaran daerah (APBD) serta lemahnya dukungan pendanaan dari tingkat provinsi yang menyebabkan

beberapa program pengembangan sarana prasarana menjadi terhambat.

Selain kendala anggaran, keberlanjutan pengembangan Pantai Tanjung Lapin juga dipengaruhi oleh faktor penghambat struktural dan teknis yang krusial. Masalah aksesibilitas berupa infrastruktur jalan yang belum memadai serta ancaman lingkungan seperti abrasi pantai menjadi tantangan utama yang memerlukan respons kebijakan yang lebih cepat dan taktis. Di sisi lain, dinamika sosial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal masih bersifat pasif dan cenderung didominasi oleh elite tertentu, sehingga distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata belum sepenuhnya merata. Untuk itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang lebih inklusif dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas, serta peningkatan strategi promosi digital agar keunggulan kompetitif Pantai Tanjung Lapin dapat dikenal secara luas dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anastasia, M., dkk. (2014). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Abdul Wahab, S. (2006). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara



- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Lexi, J. Meleong. (1991). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pendit, N. S. (2006). *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*. Jakarta: Pradana Paramita.
- Nugroho, D. Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siagian, Sondang P (2000). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suwantoro, G. (2006). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. Grasindo
- Marthen Rummar, (2025) *Kebijakan Pariwisata dan Pengelolaan Taman Nasional*.: Penerbit Adab.
- Prihati, (2018) *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*.: Jakad Media Publishing
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Pasal 4 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  
tentang Kepariwisataan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 50  
Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS)
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Riau (RIPPDA)
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bengkalis*
- Jurnal**

- Mustapa, H. (2019). Politik Pariwisata Daerah dalam Perspektif Civil Society. *Politicon*, 1(1), 24–50.
- Prasiasa, D.P.O. (2022). Pengembangan Daerah Wisata dalam Bingkai Politik Pariwisata: Development of Tourism Areas within the Framework of Tourism Politics. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 3(1), 55–68.
- Pujiati, S. (2022). Analisis Pengelolaan Wisata Bahari di Pulau Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Puteri, J., Harto, S., & Adianto. (2022). Pengembangan Pariwisata di Rupat Utara dalam Perspektif Sustainable Tourism. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Universitas Banten Jaya*. 5(1). 55-73.
- Rheza, M & Rusli, Z. (2019). Pengembangan Kawasan Wisata Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. *JOM FISIP*, 6(I), 1-13.
- Sasili, A. S. A. (2023). Peran Strategis Dinas Pariwisata Sebagai Salah Satu Aktor Pengembangan Pariwisata Pantai (Studi Kabupaten Gunungkidul Dari Perspektif Ilmu Pemerintahan). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 481-496.
- Rizky, S. M., & Yuliani, F. (2017). Stategi Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Objek Wisata pantai pesona Kecamatan Rupat Utara kabupaten bengkalis. *Jom Fisip*, 4(2), 1–12.
- Rusli, Z. (2019). Pengembangan Kawasan Wisata Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 1–13.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/23474>
- Syafaat, A. (2023). Strategi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam Pengembangan Objek Wisata di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. *JOM FISIP*, 6(I), 1-13.
- Amri, K., Wahidar, T. I., Fuadi, A., Saputra, T., & Nastasya, M. (2023). Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dalam Peningkatan PAD Sektor Pariwisata Di Pesisir Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 16(2), 307-313.
- Nainggolan, H. (2023). Kebijakan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Rupat Utara. *Jurnal Niara*, 16(2), 416-424.

- Putra, A., As'ari, H., & Adianto, A. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. *Journal Publicuho*, 5(4), 1149-1161.
- Amri, K., Wahidar, T. I., Fuadi, A., Habibie, D. K., & Meiwanda, G. (2022). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Kspn) Di Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 15(2), 379-387.
- Suhastini, N. (2019). Strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan wisata pantai di kawasan Lombok Timur. *Komunitas*, 10(2), 107-122.
- Irwan, S. T. Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Rupert Utara: Tantangan dan Solusi.
- Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(1), 28-38.
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. *Publik*, 8(1), 79-90.
- Syukri, S., Fithra, H., & Akmal, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Pulau Baguk Kecamatan Pulau Banyak. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 2(1), 45-51.
- Jupir, M. M. (2013). Implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal (studi di Kabupaten Manggarai Barat). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 1(1), 28-38.
- Bida, O., Sigiro, B., & Hadirman, H. (2025). Sinergi Budaya Kebijakan Publik Dalam pengemasan Pariwisata Berbasis kearifan Lokal Di Kota Tomohon: Telaah Atas Faktor Politik, Sosial Ekonomi, Dan Lingkungan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(9), 2657-2682.
- Joni, J. H., Munawarah, F., Riski, S. A., & Suwariya, E. (2023). Pengembangan Dan Pembangunan Destinasi Halal Pantai Rupert Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Rupert. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 1-11.
- Syaiful, S., & Agustiani, A. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mandi Safar Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Tanjung Punak Rupert Utara

Kabupaten Bengkalis. Jurnal  
Ekonomi, Sosial & Humaniora,  
4(06), 13-32.

Prayogo, A. F. (2019). Politik  
Pariwisata di Jawa Timur: Studi  
Relasi antar Pemerintah dalam  
Peningkatan Nilai Pariwisata  
pada Taman Nasional Bromo  
Tengger Semeru (Doctoral  
dissertation, Universitas  
Airlangga).

Syaiful, S. (2021). Strategi  
Pengembangan Tari Zapin Api  
Sebagai Daya Tarik Wisata  
Budaya Di Pulau Rupat  
Kabupaten Bengkalis. Jurnal  
Ekonomi, Sosial & Humaniora,  
2(12), 96-114.